



PENGUMUMAN
LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA
(Tanggal Penyampaian/Jenis Laporan - Tahun: 8 Maret 2023/Periodik - 2022)

BIDANG : EKSEKUTIF
LEMBAGA : KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET, DAN TEKNOLOGI
UNIT KERJA : UNIVERSITAS SEBELAS MARET

I. DATA PRIBADI

1. Nama : **NOORYAN BAHARI**
2. Jabatan : **WAKIL DEKAN PERENCANAAN, KERJASAMA BISNIS DAN INFORMASI**
3. NHK : **736304**

II. DATA HARTA

A. TANAH DAN BANGUNAN Rp. 1.100.000.000

1. Tanah dan Bangunan Seluas 99 m2/144 m2 di KAB / KOTA BANTUL, HASIL SENDIRI Rp. 1.100.000.000

B. ALAT TRANSPORTASI DAN MESIN Rp. 104.250.000

1. MOTOR, HONDA VARIO 150 Tahun 2015, HASIL SENDIRI Rp. 12.500.000
2. MOTOR, HONDA REVO 110 Tahun 2011, HASIL SENDIRI Rp. 4.000.000
3. MOTOR, SUZUKI SMASH Tahun 2007, HASIL SENDIRI Rp. 3.000.000
4. LAINNYA, POLYGON SEPEDA GUNUNG COSMIC RXX CARBON Tahun 2012, HASIL SENDIRI Rp. 10.000.000
5. LAINNYA, POLYGON MB UNITOGA Tahun 2003, HASIL SENDIRI Rp. 250.000
6. LAINNYA, POLYGON SEPEDA GUNUNG PREMIER Tahun 2016, HASIL SENDIRI Rp. 2.000.000
7. LAINNYA, TERN SEPEDA LIPAT VERGE P10 UPGRADE CRANK & FD TIAGRA Tahun 2020, HASIL SENDIRI Rp. 17.500.000
8. MOTOR, HONDA PCX 160 Tahun 2021, HASIL SENDIRI Rp. 27.500.000
9. LAINNYA, SEPEDA GUNUNG SEPEDA GUNUNG Tahun 2022, HASIL SENDIRI Rp. 27.500.000

C. HARTA BERGERAK LAINNYA Rp. 99.549.000



D. SURAT BERHARGA	Rp.	----
E. KAS DAN SETARA KAS	Rp.	22.000.000
F. HARTA LAINNYA	Rp.	----
Sub Total	Rp.	1.325.799.000
III. HUTANG	Rp.	625.272.250
IV. TOTAL HARTA KEKAYAAN (II-III)	Rp.	700.526.750

Catatan:

1. Rincian harta kekayaan dalam lembar ini merupakan dokumen yang dicetak secara otomatis dari elhkpn.kpk.go.id. Seluruh data dan informasi yang tercantum dalam dokumen ini sesuai dengan LHKPN yang diisi dan dikirimkan sendiri oleh Penyelenggara Negara melalui elhkpn.kpk.go.id, serta tidak dapat dijadikan dasar oleh Penyelenggara Negara yang bersangkutan atau siapapun juga untuk menyatakan bahwa harta kekayaan yang bersangkutan tidak terkait tindak pidana. Apabila dikemudian hari terdapat harta kekayaan milik Penyelenggara Negara dan/atau Keluarganya yang tidak dilaporkan dalam LHKPN, maka Penyelenggara Negara wajib untuk bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Pengumuman ini telah ditempatkan dalam media pengumuman resmi KPK dalam rangka memfasilitasi pemenuhan kewajiban Penyelenggara Negara untuk mengumumkan harta kekayaan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.
3. Pengumuman ini tidak memerlukan tanda tangan karena dicetak secara otomatis.